


Manual Book

Permohonan Pergeseran Anggaran

Subbidang Perencanaan
Anggaran



A. Jenis Pergeseran Anggaran

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek

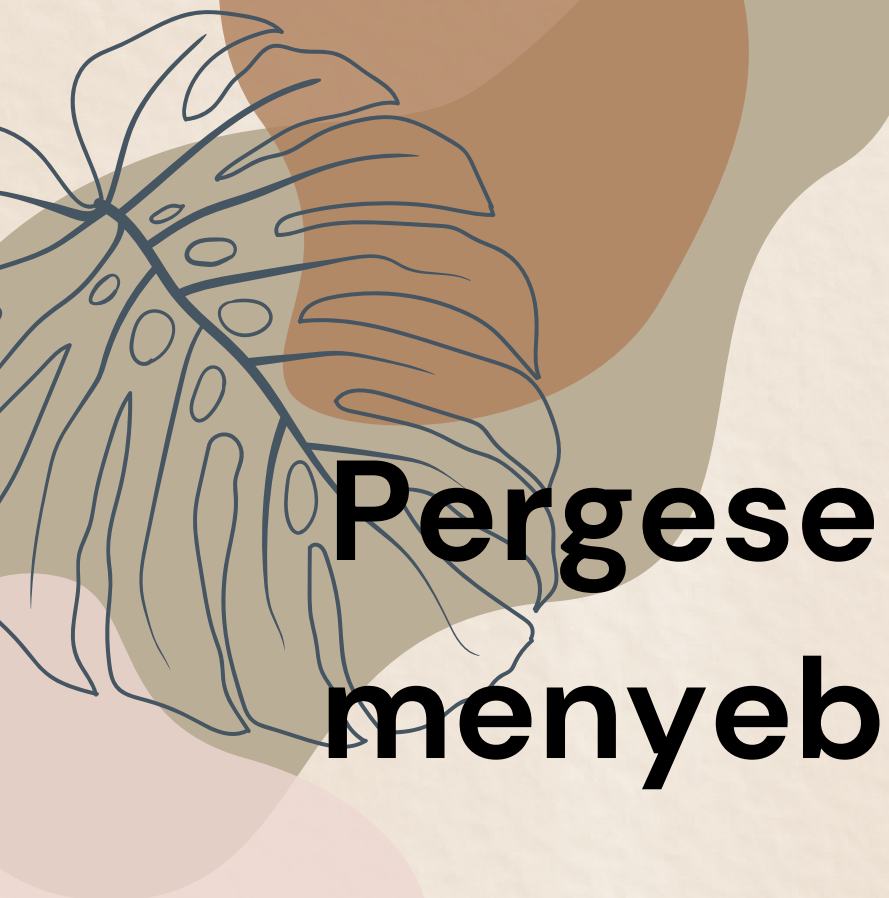
Pergeseran anggaran terdiri atas :



pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD

pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD





Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD


antar objek dalam jenis yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah

antar rincian objek dalam objek yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD

antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD

atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.






Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dilaksanakan mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD dengan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan dalam hal terdapat kondisi mendesak sesuai kriteria yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah

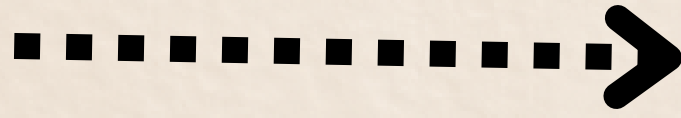


Mekanisme Pergeseran Anggaran

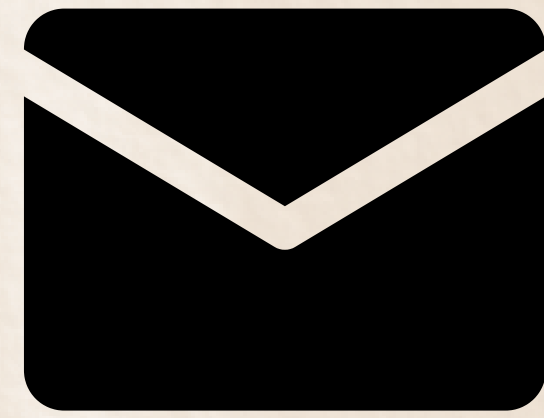
konsep



SKPD membuat alasan dan matriks pergeseran



e-office



mengirim surat permohonan kepada walikota



entry pergeseran



SKPD pemohon entry pergeseran anggaran yang telah dibahas dan diverifikasi oleh tim pergeseran



pembahasan



permohonan pergeseran anggaran dibahas dan diverifikasi oleh tim pergeseran anggaran dan SKPD pemohon



DPA dan anggaran kas



SKPD mengirim DPA dan anggaran kas (2 rangkap)

1. Konsep Matriks dan Alasan

SKPD pemohon membuat surat permohonan yang memuat alasan terjadinya pergeseran anggaran dengan dilampiri:

- a. matriks pergeseran anggaran; dan
- b. matriks anggaran kas.

Format Surat Permohonan Pergeseran Anggaran Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2022

KOP SKPD

Yogyakarta,

No. : KEPADA
Sifat : Segera Yth. WALIKOTA YOGYAKARTA
Lampiran : DI
Hal : Usulan Pergeseran Anggaran YOGYAKARTA
dalam APBD TA.

Dengan hormat, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor tanggal, bersama ini disampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan di BPKAD (hanya contoh), kami mengajukan usulan pergeseran anggaran dalam APBD Tahun Anggaran dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.
2.
3. Dst.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon pergeseran anggaran dimaksud dapat disetujui dan diproses lebih lanjut.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala

.....
NIP.

Tembusan:

1. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
2. Kepala Bappeda Kota Yogyakarta;
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta;
4. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta.

Format Matriks Pergeseran Anggaran

Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2022

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
Tahun Anggaran ****

NO.	SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN		
		KODE REK	URAIAN	JML (Rp)	KODE REK	URAIAN	JML (Rp)
1	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	9999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	9999999
		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	9999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	9999999
2	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	9999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	9999999
		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	9999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	9999999

Yogyakarta,
Tgl/bulan/tahun
Kepala Badan/Dinas

XXXXXXXXXXXX
NIP.

2. Mengirim Surat

SKPD pemohon mengirimkan surat permohonan disertai alasan dan matriks melalui **e-office JSS**.

Surat permohonan dikirimkan **kepada Walikota Yogyakarta** dengan tembusan:

1. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
2. Kepala Bappeda Kota Yogyakarta;
3. Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan Setda Kota Yogyakarta;
4. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta.



3. Pembahasan Bersama

Permohonan pergeseran anggaran **dibahas dan diverifikasi** oleh **tim pergeseran anggaran** bersama **SKPD pemohon**.

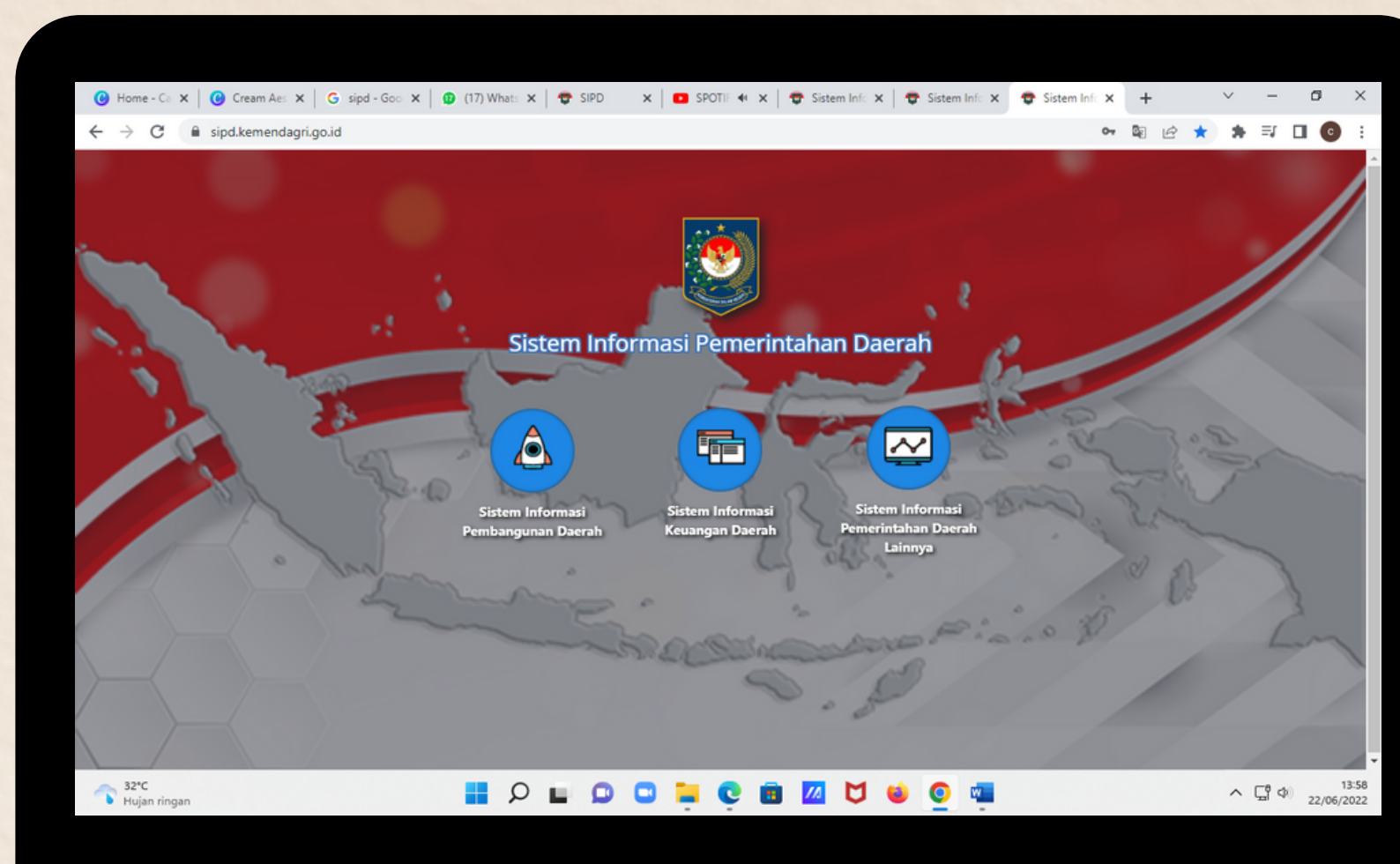
Persetujuan pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD diadministrasikan dalam perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.



4. Entry Pergeseran

Setelah permohonan pergeseran anggaran dibahas dan diverifikasi oleh tim pergeseran anggaran, SKPD pemohon melakukan entry pergeseran untuk anggaran yang disetujui pada sistem.

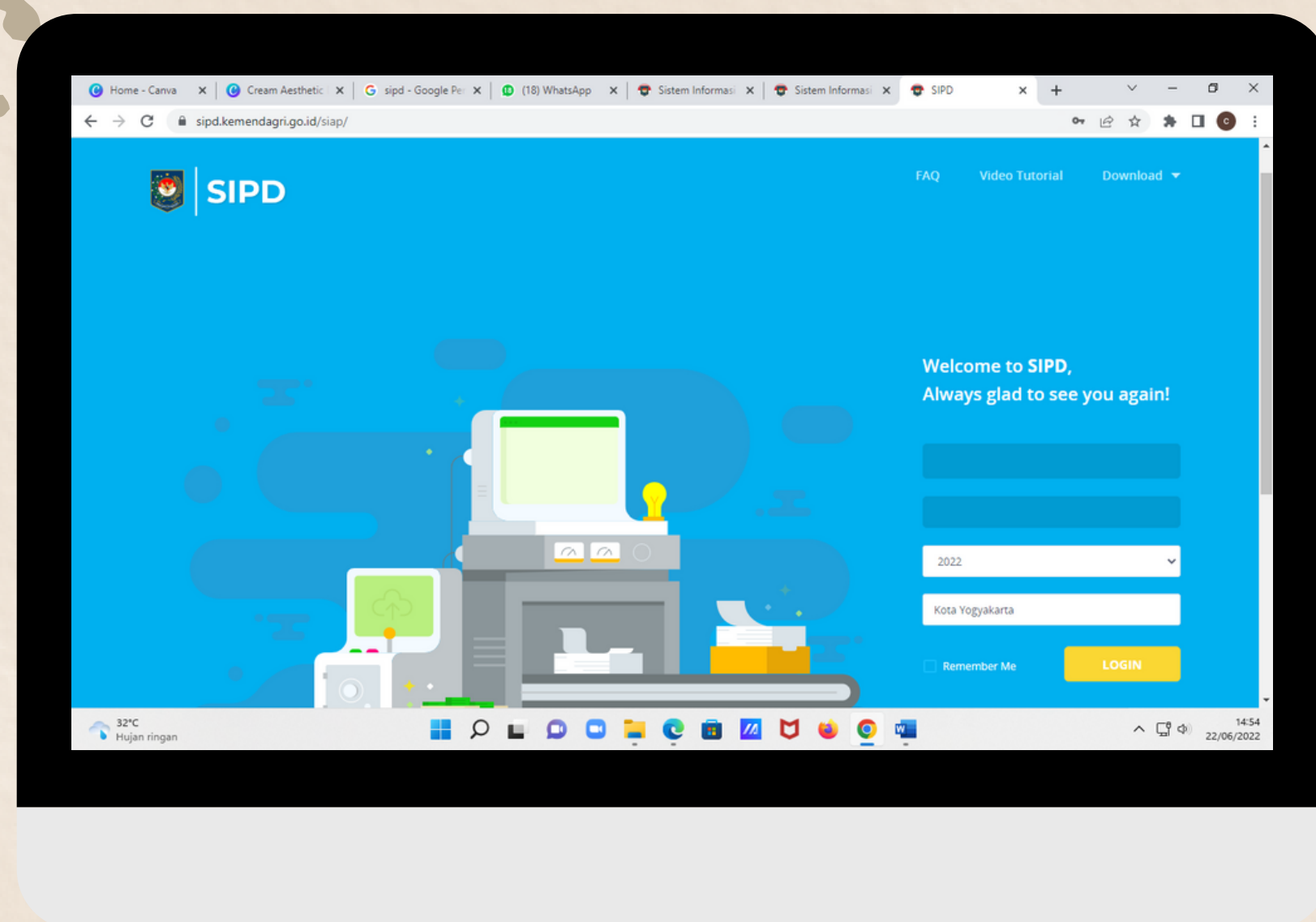
1. Login menggunakan akun operator melalui **<https://sipd.kemendagri.go.id/>**
2. Cari **sub kegiatan yang sudah diverifikasi** dan dibahas oleh tim pergeseran anggaran
3. Lakukan **entry pergeseran anggaran** pada sub kegiatan di atas
4. Lakukan **validasi Pengguna Anggaran (PA)**
5. Lapor ke BPKAD untuk **dicek kesesuaian** dengan permohonan pergeseran anggaran



Entry Pergeseran (Anggaran Kas)

Setelah BPKAD menetapkan pergeseran anggaran, SKPD entry anggaran kas

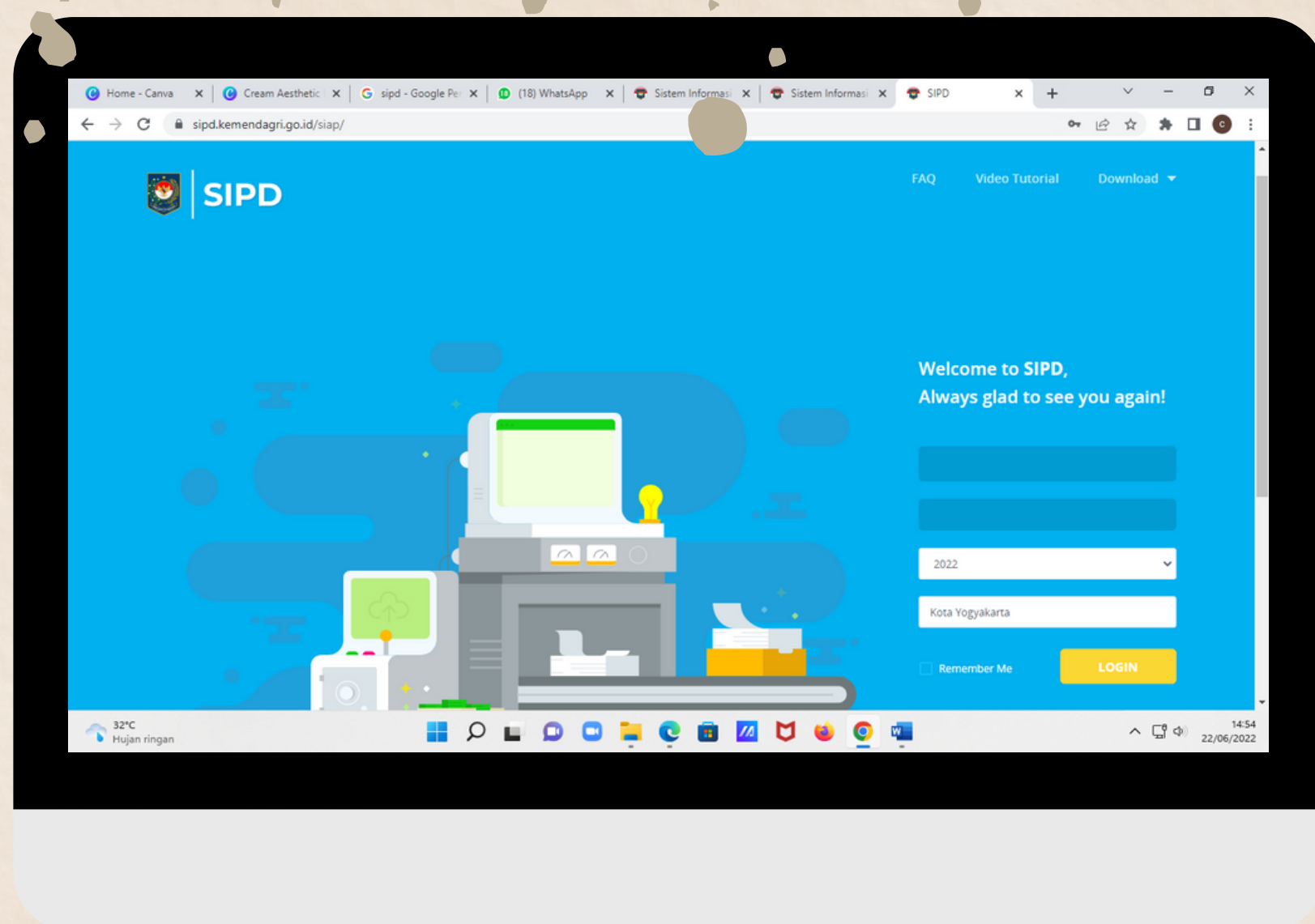
1. Login menggunakan akun Kepala Subbagian PEP melalui **<https://sipd.kemendagri.go.id/siap/>**
2. Entry **anggaran kas** yang dilakukan pergeseran anggaran
3. Lapor bidang perbendaharaan BPKAD untuk **dicek kesesuaian**
4. Setelah sesuai lakukan **validasi PA**
5. BPKAD akan melakukan **validasi BUD**



5. Perubahan DPA-SKPD dan perubahan anggaran kas

SKPD menyiapkan **perubahan DPA-SKPD dan perubahan anggaran kas untuk dikirim ke BPKAD.**

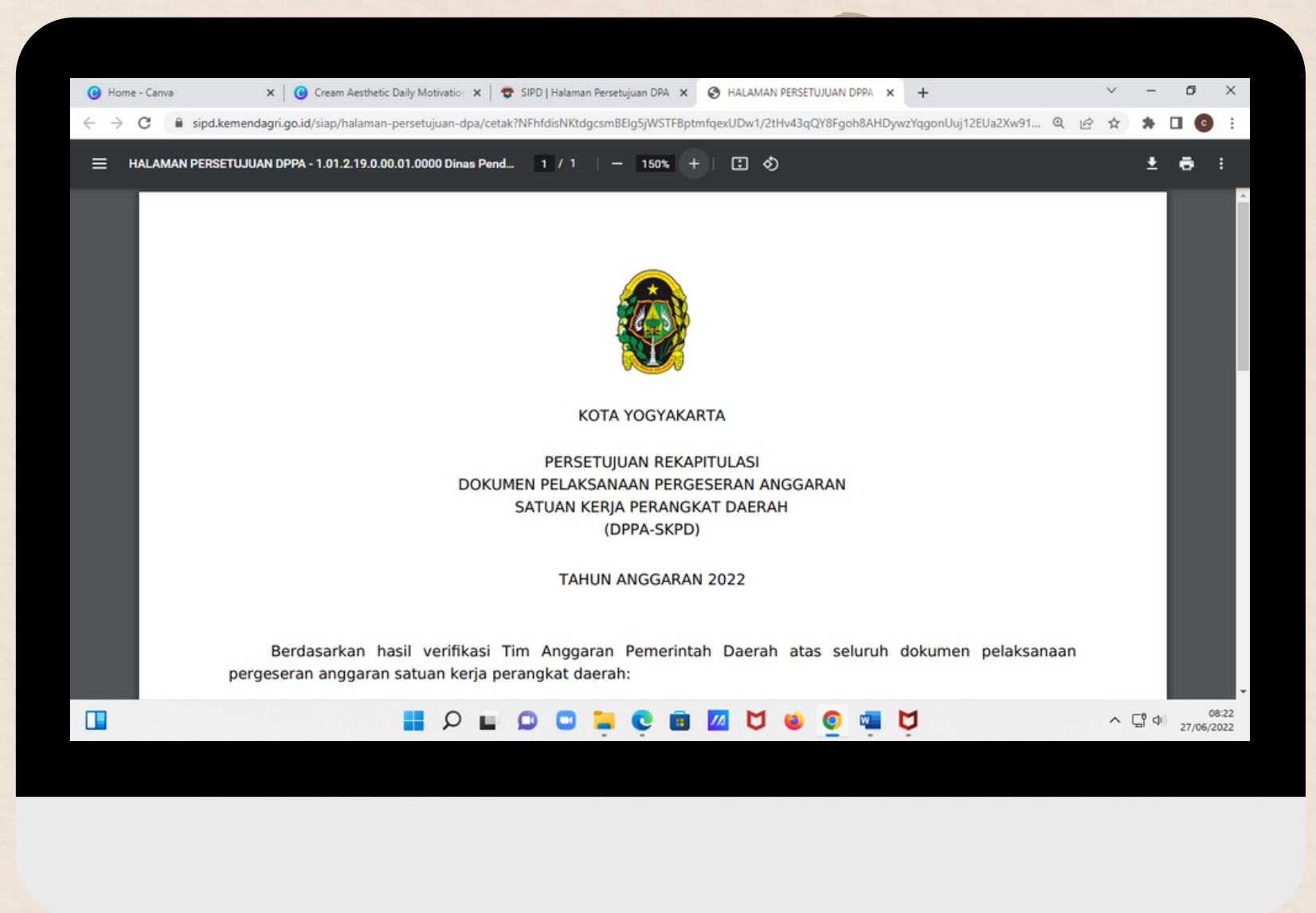
Perubahan DPA-SKPD disahkan oleh PPKD dan disetujui oleh Sekretaris Daerah. Perubahan DPA-SKPD dan perubahan anggaran kas tersebut menjadi dasar pelaksanaan pergeseran anggaran.



Perubahan DPA-SKPD

Perubahan DPA dikirim sebanyak 2 dokumen (2 rangkap) dengan rincian:

1. Halaman persetujuan DPA
2. Halaman depan DPA
3. DPA pendapatan (jika ada)
4. DPA belanja
5. DPA rincian belanja (**hanya kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran**)
6. DPA pembiayaan (jika ada)



Perubahan DPA-SKPD

Perubahan DPA dikirim sebanyak 2 dokumen (2 rangkap). 1 dokumen untuk BPKAD dan 1 dokumen untuk SKPD pemohon.

Setelah selesai disahkan SKPD dapat **mengambil perubahan DPA ke bidang anggaran.**

